

LAPORAN KINERJA

Triwulan II tahun 2020

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG



Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Bitung, 10 Juli 2020
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Donny Muhamad Faisal, S.St.Pi, S.Pi, M.Si
NIP. 19790502 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2020 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Strategis (SS) dan 28 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 102,59 dengan rincian 19 indikator kinerja capaiannya masuk kategori “Baik” atau dengan persentase capaian 90% s.d 100% (Hijau), 3 indikator kinerja capaiannya masuk kategori “Cukup” atau dengan persentase capaian 70% s.d <90%, dan 6 Indikator Kinerja “Belum ada penilaian”.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Triwulan I dengan persentase kenaikan sebesar 2,98%. Kenaikan persentase capaian pada Triwulan II tahun 2020, disebabkan persentase capaian beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan atau diatas 100%, yaitu: Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP, Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dan Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Beberapa IKU perlu dilakukan percepatan pencapaian kinerja, yaitu: IK8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup

Pangkalan PSDKP Bitung; dan IK18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan dan Operasi Armada (2350), Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp39,3 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2020 Rp12,3 miliar atau 31,19%.

Laporan Kinerja (LKj) ini kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	11
Tabel 2	Capaian Kinerja per Unit Kerja Tahun 2020	15
Tabel 3	Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2020	16
Tabel 4	Perbandingan Capaian IK2 pada Triwulan II Tahun 2019 dan 2020	19
Tabel 5	Capaian Kegiatan Pendukung IK2 di Triwulan II Tahun 2020	20
Tabel 6	Hasil pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing Triwulan II tahun 2020 lingkup Pangkalan Bitung	25
Tabel 7	Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2019 dan 2020	27
Tabel 8	Hasil Pengawasan Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	28
Tabel 9	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2020	32
Tabel 10	Persentase Cakupan WPPNRI Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	33
Tabel 11	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	37
Tabel 12	Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2020	38
Tabel 13	Capaian Hari Operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	39
Tabel 14	Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Ditangani Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	40
Tabel 15	Data Barang Bukti Kapal Pelaku TPKP Triwulan II Tahun 2020	42
Tabel 16	Jumlah Awak Kapal yang Selesai Ditangani per Juni 2020	44
Tabel 17	Penerapan MP Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020	46
Tabel 18	Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2020	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *“good governance”*.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2020 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
 - b. Eksploitasi mangrove.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

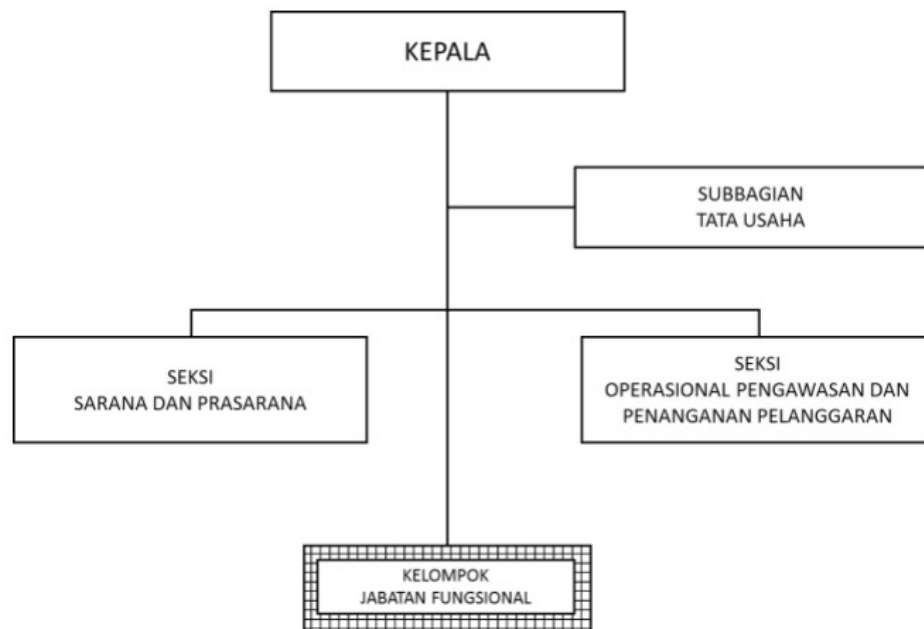
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

- c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

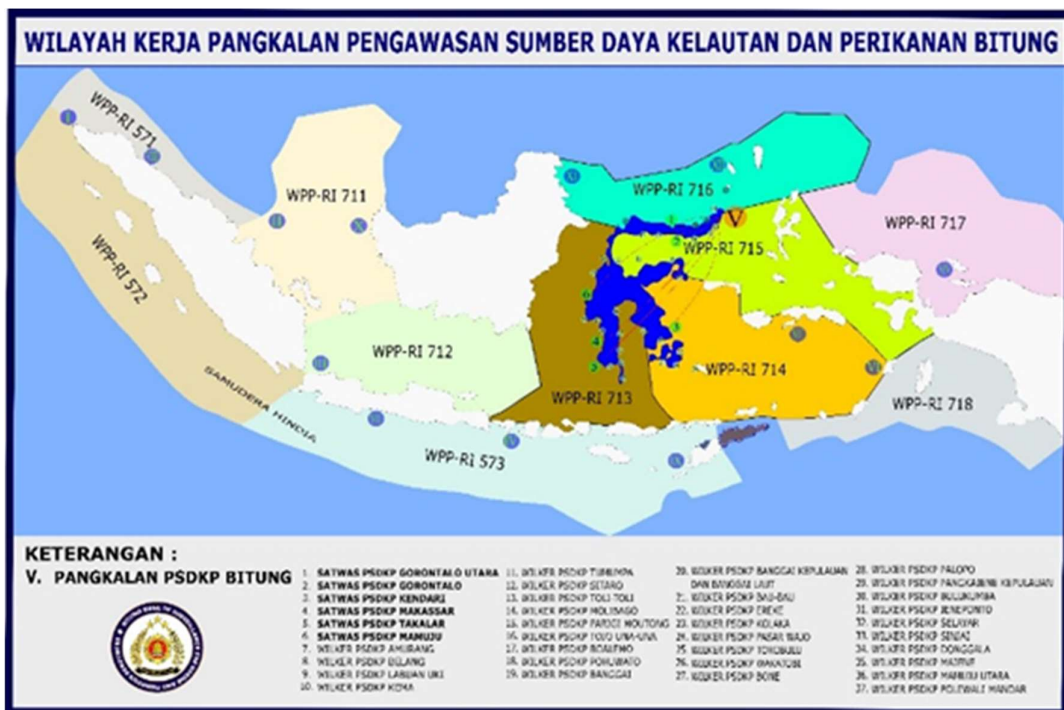


Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.

- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II tahun 2020 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

- 1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
- 2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
- 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020; dan
- 4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2019-2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2019-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan logical model yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)*

yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).

Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Di sisi lain, pendekatan *balanced scorecard (BSC)* adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- a. Stakeholder perspective: “Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”.
- b. Customer perspective: “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”.
- c. Internal Process perspective
 - 1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
 - 2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
- d. Learning and growth perspective
 - 1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
 - 2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
 - 3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
 - 4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel.

5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2019-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2020 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan dan Operasi Armada;
 - a. Operasional Kapal Pengawas
 - b. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi
 - c. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi
 - d. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
 - e. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel
 - b. Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan
 - d. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Kapal Perikanan yang Laik Operasional
 - b. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - c. Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - d. Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
 - b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - c. Layanan Perkantoran

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)	55
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,75
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,204

		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	2
		8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	178
		10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	360
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	85
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	25
		13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)	40
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	72
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup (%)	82

	19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
	24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)	80
	27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Baik (88)
	28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019 (%)	1

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerja* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2020

Sasaran dan indikator kinerja yang dikelola oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) Sasaran Kinerja dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Berdasarkan perhitungan Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id), capaian IKU UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 102,56 dengan skor kinerja (IKU dan IK) sebesar **102,59**. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2020 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Triwulan II tahun 2019 sebesar 105,86 atau mengalami penurunan -3,26%.

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Unit Kerja	TW I	TW II	% (+/-)
1.	UPT Pangkalan PSDKP Bitung	99,61	102,59	2,98
2.	Subbagian Tata Usaha	99,99	102,40	2,41
3.	Seksi Sarana dan Prasarana	98,08	92,86	(-5,22)
4.	Seksi Ops Pengawasan dan PP	100,00	106,04	6,04

Secara umum, capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Triwulan I dengan persentase kenaikan sebesar 2,98%. Kenaikan persentase capaian pada Triwulan II tahun 2020, disebabkan persentase capaian beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan atau diatas 100%, indikator tersebut antara lain: IKS.02.1 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, IKS.04.1 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP, IKS.04.2 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dan IKS.06.3 Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Rincian capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2020

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	%
SS1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat					
IK1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	70	-	-	
SS2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan					
IK2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaku Usaha	55	11	14	120
SS3. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan					
IK3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
SS4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP					
IK4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	0,75	0,20	0,47	120
IK5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	0,204	0,08	0,14	120
IK6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	%	70	70	70	100
SS.5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP					
IK7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	2	2	2	100
IK8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	16	16	15	93,75
SS6. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP					
IK9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	Unit	178	45	83	120
IK10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat	Unit	360	140	140	100
IK11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	85	20	35	120
IK12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	25	7	7	100
IK13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Orang	40	-	-	
SS7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan					

IK14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	70,59	70,59
IK15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	93	70,59	75,90
IK16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	93	68,83	74,01
SS8. Tata kelola pemerintahan yang baik					
IK17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	72	-	-	
IK18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	82	70	68,89	98,41
IK19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	40	40	100
IK20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	40	40	100
IK21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
IK22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	25	25	100
IK23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	Unit Kerja	1	-	-	
IK24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
IK25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100	100
IK26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	Indeks	80	-	-	
IK27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai	Baik (88)	65	85	120
IK28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019	%	1	-	-	

(<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/home/view/973/6/2020/0> tanggal 9 Juli 2020)

Warna	Keterangan
Sangat Baik	100 s.d 120 + Ide Baru
Baik	90 s.d 100
Cukup	70 s.d <90
Kurang	50 s.d <70
Sangat Kurang	<=50
Belum ada penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II tahun 2020, 19 (sembilan belas) indikator persentase capaiannya antara 90% s.d 100% (Hijau), 3 (tiga) indikator persentase capaiannya antara 70% s.d <90% (Kuning), dan 6 (enam) indikator belum ada penilaian (Abu-abu) karena capaiannya baru dapat di ukur pada Triwulan IV tahun 2020. Indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% yaitu meliputi: 1) IKS.05.2 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dari target 16 unit *speedboat* yang siap operasi hanya 15 unit yang siap operasi, disebabkan satu unit *speedboat* yaitu SP. Dolphin 03 yang berada di Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masih dalam kondisi rusak dan belum dapat beroperasi; 2) IKS.07.1 Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dari total 17 kasus TPKP yang di sidik oleh PPNS UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 baru 12 kasus yang dinyatakan lengkap atau telah P-21; 3) IKS.07.2 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dari total 17 kasus TPKP yang di sidik oleh PPNS UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 baru 12 kasus yang dinyatakan lengkap atau telah P-21; 4) IKS.07.3 Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dari 77 awak kapal kasus TPKP yang ditangani pada Triwulan II tahun 2020, baru 53 awak kapal kasus TPKP yang selesai ditangani.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja Triwulan II tahun 2020 UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-1):

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Dalam rangka pencapaian SS-1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat di dukung dengan IKS.01.1 Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang capaiannya baru dapat di ukur pada Triwulan IV

tahun 2020. SS-1 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena SS ini baru ditambahkan tahun 2020 di UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

IK1 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IK1 Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung baru dapat di ukur pada Triwulan IV tahun 2020.

Sasaran Strategis (SS-2):

Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

SS-2 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IKS.02.1 Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS-2 pada Triwulan II tahun 2020 adalah 11 pelaku usaha, tercapai 14 pelaku usaha dengan persentase capaian sebesar 120%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-2 adalah Rp585.840.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp45.880.200 atau 7,83%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-2 sebesar 99,93% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS-2 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-2 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK2 JUMLAH PELAKU USAHA KELAUTAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA LINGKUP PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

Target IK2 pada Triwulan II tahun 2020 adalah 11 pelaku usaha, tercapai 14 pelaku usaha dengan persentase capaian kinerja 120%.

Tabel 4. Perbandingan Capaian IK2 pada Triwulan II Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TW II 2019	2020		
			Target	Realisasi	%
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaku Usaha	38	11	14	120%

Capaian IK2 adalah agregasi (penjumlahan) dari hasil capaian 7 (tujuh) kegiatan pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:

- Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- Pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 5. Capaian Kegiatan Pendukung IK2 di Triwulan II Tahun 2020

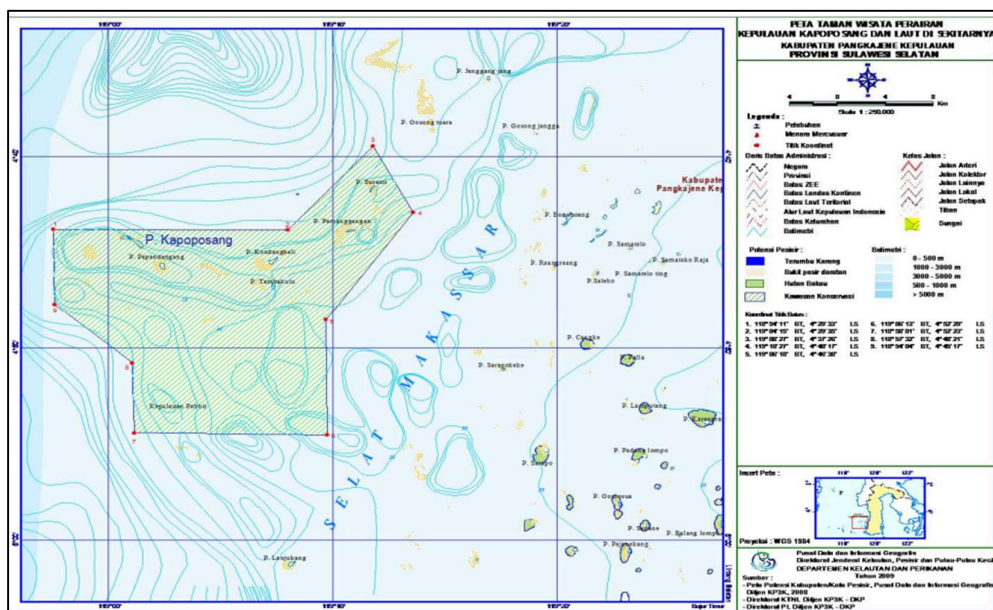
No	Nama Kegiatan	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	%
1.	Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	-	-	-
2.	Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites	-	-	-
3.	Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan	-	-	-
4.	Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	4	4	100
5.	Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan ruang laut	1	1	100
6.	Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	-	-	-
7.	Pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing	6	9	120
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya		11	14	120

Rincian capaian kegiatan pendukung kinerja IK2 di Triwulan II tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP memiliki target 17 (tujuh belas) jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB); 2) Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT); 3) Taman Wisata Perairan Kapoposang (Selawesi Selatan); 4) Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat); 5) Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau); 6) SAP Raja Ampat (Papua Barat); 7) SAP Waigeo (Papua Barat); 8) SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku); 9) Taman Wisata Perairan Padaido (Papua); 10) Taman Wisata Laut Banda (Maluku); 11) Taman Nasional Karimun Jawa ; 12) Taman Nasional Laut Bunaken; 13) Taman Nasional Laut Wakatobi; 14) Taman Nasional Laut Takabonerate; 15) Taman Nasional Teluk Cendrawasih; 16) Taman Nasional Laut Togeang; dan 17) Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Tahun 2019, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mendapat target satu kawasan konservasi perairan yaitu Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari: terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu. Dikarenakan kondisi pandemic COVID-19, lokasi Kawasan konservasi TWP Kapoposang di tutup dan pengunjung dari luar dilarang untuk memasuki kawasan Pulau Kapoposang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengawasan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 kegiatan pengawasan kawasan konservasi di TWP Kapoposang belum dapat dilaksanakan oleh Satwas SDKP Makassar.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada tahun 2020 sebesar Rp50.000.000, dan sampai Triwulan II belum ada realisasi anggaran.

2. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2020.

Selain kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung juga melaksanakan kegiatan penanganan mamalia/ikan terdampar, sebagai berikut:

- Evakuasi dugong pesisir Pantai Desa Lalos Kecamatan Galang, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah pada tanggal 5 April 2020.
Ditemukan jenis ikan Duyung (Dugong) yang merupakan jenis ikan di lindungi dalam keadaan mati di pesisir pantai Desa Lalos. Hasil identifikasi: panjang 314 cm, diameter 210 cm, berjenis kelamin jantan, kondisi tubuh Dugong terdapat 38 luka tusukan yang tidak diketahui penyebabnya namun di indikasi luka diakibatkan oleh tombak nelayan yang tidak bertanggungjawab, selanjutnya dilakukan evakuasi dengan cara di kubur.
- Evakuasi lumba-lumba di pantai Sebelah Selatan Takalar pada tanggal 10 Juni 2020.

Ditemukan jenis ikan lumba-lumba di yang terdampar di pantai sebelah selatan Satwas PSDKP Takalar oleh POKMASWAS Sitallasi (Japar), dan dilaporkan ke Pengawas Perikanan Satwas PSDKP Takalar. Setelah diidentifikasi diperoleh data jenis ikan lumba-lumba 1 ekor dengan jenis gigi kasar berukuran panjang 256 cm, lebar 187 cm, dengan berat 250 Kg dalam kondisi mati. selanjutnya lumba-lumba di evakuasi dengan cara di kuburkan.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp45.000.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 Rp2.250.000 dengan persentase realisasi anggaran 5%.

3. Pengawasan pelaku usaha pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp119.110.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 Rp3.910.000 dengan persentase realisasi anggaran 3,28%.

4. Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%
Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	100%

Pada Triwulan II tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, target Triwulan II tahun 2020 sebanyak 4 (empat) pelaku usaha tercapai 4 (empat) pelaku usaha dengan persentase capaian 100%. Keempat pelaku usaha tersebut dinyatakan taat karena berdasarkan hasil pengawasan pelaku usaha memiliki dokumen perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rincian pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2020, sebagai berikut:

- Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 16 April 2020 di PT. Fly Fish Diver, berlokasi di Pulau Bangka Desa Kahukua, Kec. Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (1048'177.7"N, 125007'03,4"E), jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort.
- Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 17 Juni 2020 di PT Coral Eye, berlokasi Pulau Bangka Desa Lihunu jaga VI Kec. Likupang Timur Kabupaten

Minahasa Utara pada posisi 01o45'04.8" LU dan 125o08'01.3"BT, jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort.

- Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 18 Juni 2020 di PT Horiguchi Sinar Insani berlokasi di Desa Talise Pulau Talise Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara (1049'16.0"N, 125004'01,5"E).
- Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir tanggal 16 April 2020 di PT. Pulisan, berlokasi di Desa Kinunang Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara (01o39'56.0" LU 125o09'48.4"BT).

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp93.480.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp9.860.000 atau 10,55%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,84% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan WP3K telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

5. Jumlah Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%
Jumlah pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	100%

Pada Triwulan II tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan ruang laut di lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, target Triwulan II tahun 2020 satu pelaku usaha tercapai satu pelaku usaha dengan persentase capaian 100%. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat karena berdasarkan hasil pengawasan pelaku usaha memiliki dokumen perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rincian pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2020, sebagai berikut:

- Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 17 Juni 2020 di PT Coral Eye, berlokasi Pulau Bangka Desa Lihunu jaga VI Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara pada posisi 01o45'04.8" LU dan 125o08'01.3"BT, jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp113.250.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp6.588.000 atau 5,82%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,77% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan ruang laut telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

6. Jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2020.

7. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing*

Pada Triwulan II tahun 2020, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* di lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, target Triwulan II tahun 2020 6 (enam) pelaku usaha tercapai 9 (sembilan) pelaku usaha dengan persentase capaian 120% (batas maksimal). Satu kapal penangkap ikan dan tiga orang tersangka telah diamankan oleh KP. Hiu 02 karena di duga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Rincian pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* Triwulan II tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing* Triwulan II tahun 2020 lingkup Pangkalan Bitung

No	Nama Kapal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil Pengawasan
1.	KM Afdhi	penangkapan ikan	Perairan Desa Kotabunan, Kab. Bolmong Timur	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
2.	KM Hati	penangkapan ikan	Perairan Desa Kotabunan, Kab. Bolmong Timur	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
3.	KM Sumber Rizki 2018	penangkapan ikan	Perairan Desa Kotabunan, Kab. Bolmong Timur	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku

4.	KM Rizki 2016	penangkapan ikan	Perairan Desa Kotabunan, Kab. Bolmong Timur	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
5.	Tanpa nama	penangkapan ikan	Perairan Kotabunan	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
6.	KM Rajawali	penangkapan ikan	Perairan Likupang, Kab. Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
7.	KM Jumeifa	penangkapan ikan	Perairan Likupang, Kab. Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
8.	KM Bintang Terang	penangkapan ikan	Perairan Likupang, Kab. Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku
9.	KM Karya Dalbers Mandiri	penangkapan ikan	Perairan Likupang, Kab. Minahasa Utara	Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp165.000.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp23.272.200 atau 14,10%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,87% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS3):

Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Capaian SS3. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan didukung indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-3 adalah Rp749.089.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp91.168.900 atau

12,24%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-3 sebesar 99,88% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS-3 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-3 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK3 PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TW II 2019	2020	
			Target	Realisasi
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit Usaha	928	534	662

Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Pengawasan kepatuhan kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
- Pengawasan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- Pengawasan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Hasil capaian Triwulan II tahun 2020 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan

Pengawasan kapal perikanan dilakukan mengacu Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 12/PER-DJPSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.350/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk

Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan kelaikan operasional terhadap 3666 kapal perikanan dengan persentase ketaatan 95,61% (3505 kapal taat).

Pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100%, karena dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, seorang Pengawas Perikanan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja, melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelayakan teknis baik pada saat kapal berangkat, saat melakukan kegiatan perikanan dan saat kedatangan, dan melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN baik online dan/atau offline.

Tabel 8. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	UPT/Satwas/Wilker	Kapal Riksa	Kapal Laik	Kapal Tidak laik
1	Pangkalan PSDKP Bitung	673	654	19
2	Wilker PSDKP Amurang	20	20	-
3	Wilker PSDKP Belang	102	98	4
4	Wilker PSDKP Labuan Uki	48	42	6
5	Wilker PSDKP Kema	50	50	-
6	Wilker PSDKP Tumumpa	127	123	4
7	Satwas SDKP Gorontalo Utara	46	46	-
8	Wilker PSDKP Toli-toli	30	8	22
9	Satwas SDKP Gorontalo	122	104	18
10	Wilker PSDKP Molibagu	38	38	-
11	Wilker PSDKP Parigi Moutong	40	40	-
12	Wilker PSDKP Tojo Una-una	27	27	-
13	Wilker PSDKP Boalemo	21	21	-
14	Wilker PSDKP Pohuwato	11	11	-
15	Satwas SDKP Kendari	354	354	-
16	Wilker PSDKP Banggai	28	28	-
17	Wilker PSDKP Banggai Keplut	56	54	2
18	Wilker PSDKP Baubau	67	32	35
19	Wilker PSDKP Kolaka	8	8	-
20	Wilker PSDKP Pasar Wajo	29	29	-
21	Wilker PSDKP Torobulu	4	4	-
22	Wilker PSDKP Wakatobi	56	55	1
23	Satwas SDKP Makassar	96	96	-
24	Wilker PSDKP Bone	196	196	-
25	Wilker PSDKP Palopo	5	5	-
26	Wilker PSDKP Pangkep	30	30	-
27	Satwas SDKP Takalar	281	281	-

28	Wilker PSDKP Bulukumba	119	118	1
29	Wilker PSDKP Selayar	21	21	-
30	Wilker PSDKP Sinjai	775	726	49
31	Satwas SDKP Mamuju	67	67	-
32	Wilker PSDKP Donggala	57	57	-
33	Wilker PSDKP Majene	37	37	-
34	Wilker PSDKP Polman	25	25	-
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya		3666	3505	161

Kapal dinyatakan tidak laik melakukan operasi perikanan antara lain: kapal akan kembali ke pelabuhan pangkalan/asal, kapal tidak melakukan aktifitas perikanan, kapal akan melakukan perbaikan/docking, dan kapal yang sementara mengurus kelengkapan dokumen.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp411.862.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp77.339.700 atau 18,78%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,81% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan kapal perikanan yang laik operasional telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan

Pada Triwulan II tahun 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

No	Pelaksana	Skala Usaha			% Ketaatan
		Besar	Kecil	Jumlah	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	2	-	2	100
2	Satwas SDKP	-	2	2	100
3	Wilker PSDKP	1	8	9	100
Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		3	10	13	100

Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100%,

karena dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, seorang Pengawas Perikanan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan perizinan dan dokumen administrasi, dan melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN baik online dan/atau offline.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp105.920.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp6.769.200 atau 6,39%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,94% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan

Pada Triwulan II tahun 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) unit usaha pembudidayaan ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

No	Pelaksana	Jenis Budidaya			% Ketaatan
		Laut	Payau	Tawar	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	-	-	-	-
2	Satwas SDKP	-	3	-	100
3	Wilker PSDKP	2	6	-	100
Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa		2	9	-	100

Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100%, karena dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, seorang Pengawas Perikanan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan kelayakan teknis, dan melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN baik online dan/atau offline.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp133.550.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar

Rp4.480.000 atau 3,35%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,97% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

4. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan

Pada Triwulan II tahun 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit usaha distribusi hasil perikanan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

No	Pelaksana	Skala Usaha			% Ketaatan
		Besar	Kecil	Jumlah	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	2	-	2	100
2	Satwas SDKP	-	-	-	-
3	Wilker PSDKP	-	-	-	-
Jumlah Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa		2	-	-	100

Pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100%, karena dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, seorang Pengawas Perikanan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen administrasi, pemeriksaan kelayakan teknis, dan melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN baik online dan/atau offline.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp93.757.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp2.580.000 atau 2,75%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,97% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan pengawasan unit usaha distribusi hasil perikanan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS4) :

Terselenggaranya Pemantauan SDKP

SS4. Terselenggaranya pemantauan SDKP terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 3) IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-4 adalah Rp11.024.140.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp3.493.554.552 atau 31,69%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,69% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-4 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 dari target 0,20% tercapai 0,47% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau).

Tabel 9. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2020

No	Nama Kapal Pengawas	Total Hari Operasi	Cakupan Teoritis (CT) NM2	Cakupan Aktual (CA) NM2	% Cakupan Aktual
1	KP. Hiu 02	34	65,205	5,216	0,27
2	KP. Hiu 05	35	47,520	3,802	0,20
TOTAL			112,725	9,018	0,47

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp9.027.447.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp3.046.693.716 atau 33,75%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,68% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja

pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan cakupan WPP yang dipantau menggunakan kapal pengawas telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU DARI KEGIATAN ILEGAL FISHING MELALUI OPERASIONAL SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 dari target 0.08% tercapai 0.14% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau).

Tabel 10. Persentase Cakupan WPPNRI Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Total Hari Operasi	Cakupan Wilayah (NM2)	Cakupan Aktual (NM2)	%Cakupan Wilayah
1.	Albacore 01	13	2520	252	0,0131
2.	Dolphin 03	-	-	-	-
3.	Dolphin 19	14	2800	280	0,0145
4.	Dolphin 26	5	1800	180	0,0093
5.	Napoleon 30	-	-	-	-
6.	Napoleon 31	20	6440	644	0,0334
7.	Napoleon 56	-	-	-	-
8.	Sea Rider 06	17	3480	348	0,0180
9.	Rubber Boat Bone	10	2000	200	0,0104
10.	Rubber Boat Kendari	10	2280	228	0,0118
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	10	2000	200	0,0104
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	2	400	40	0,0021
13.	Rubber Boat Pangkep	-	-	-	-
14.	Rubber Boat Selayar	8	1680	168	0,0087
15.	Rubber Boat Takalar	5	1000	100	0,0052
16.	Rubber Boat Wakatobi	6	1200	120	0,0062
TOTAL				2760	0,14

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.894.693.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp426.079.186 atau 22,49%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,77% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada

kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan cakupan WPP yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK 6 - PERSENTASE KESIAPAN SISTEM PEMANTAUAN SDKP

Capaian kinerja IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP pada Triwulan II tahun 2020 dari target 70% tercapai 70% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau).

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp102.000.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp20.781.650 atau 20,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,80% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS5):

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Capaian SS5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: IKU Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKU Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-5 adalah Rp6.291.464.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp528.563.956 atau 8,40%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-5 sebesar 99,91% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-5 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK7 JUMLAH KAPAL PENGAWAS YANG SIAP OPERASI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020 terdapat 2 (dua) kapal pengawas yang siap beroperasi yaitu: KP. Hiu 02 dan KP Hiu 05. Capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II tahun adalah 100%, karena 2 Unit kapal pengawas yang ada di Pangkalan PSDKP Bitung, semuanya dalam kondisi siap operasi.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp5.845.136.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp490.119.300 atau 8,39%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,92% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK8 JUMLAH SPEEDBOAT YANG SIAP OPERASI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Untuk mendukung pengawasan SDKP di laut, UPT Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 8 Unit speedboat, 1 Unit RIB, dan 8 Unit rubber boat. Dari 16 Unit tersebut, 1 Unit tidak dapat beroperasi karena masih dalam perbaikan mesin yang rusak, sehingga persentase capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II tahun 2020 adalah 93,75%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp446.328.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp38.444.656 atau 8,61%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,91% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS6):

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Capaian SS6. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP di dukung dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut

menggunakan kapal pengawas; 2) IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat; 3) IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 4) IKU Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 4) IKU Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-6 adalah Rp10.978.840.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp3.472.772.902 atau 31,63%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-6 sebesar 99,27% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-6 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK9 JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA DI LAUT MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh kapal pengawas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah sebanyak 83 Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan persentase capaian 120%. Rincian capaian kinerja IKU ini adalah sebagai berikut:

- KP. Hiu 02, dengan total capaian hari operasi 34 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 Kapal Ikan Indonesia (KII). 40 KII dokumen lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar, dan 1 KII di amankan karena di duga melakukan kegiatan pengeboman ikan di Perairan sebelah timur Pulau Kumeke, Kab. Bomong Timur, Sulawesi Utara.
- KP. Hiu 05, dengan total capaian hari operasi 35 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 42 Kapal Ikan Indonesia (KII), dokumen lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp9.027.447.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp3.046.693.716 atau 33,75%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,21% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa

semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK10 JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA DI LAUT MENGGUNAKAN SPEEDBOAT

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh speedboat/RIB/rubber boat lingkup UPT Pangkalan PSDKP Bitung di Triwulan II tahun 2020 adalah sebanyak 140 Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan persentase capaian kinerja 100%.

Tabel 11. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah KII yang Diperiksa	Keterangan
1.	SP. Albacore 01	6 KII	dokumen lengkap
2.	SP. Dolphin 03	-	tidak operasi
3.	SP. Dolphin 19	-	belum update
4.	SP. Dolphin 26	12 KII	
5.	SP. Napoleon 30	-	tidak operasi
6.	SP. Napoleon 31	69 KII	66 KII dokumen lengkap, 3 KII diberikan surat teguran dan membuat surat pernyataan (2 KII tidak mengaktifkan VMS, 1 KII kelebihan ABK)
7.	SP. Napoleon 56	-	Belum operasi
8.	Sea Rider 06	10 KII	7 KII dokumen lengkap, 3 KII yang tidak lengkap dokumen sehingga diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi dokumen
9.	Rubber Boat Bone	11 KII	10 KII dokumen lengkap, 1 KII tidak lengkap dokumen, sehingga diberikan pembinaan untuk mengurus dokumen di instansi terkait
10.	Rubber Boat Kendari	-	tidak operasi
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	6 KII	dokumen lengkap
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	-	tidak operasi
13.	Rubber Boat Pangkep	-	tidak operasi
14.	Rubber Boat Selayar	17 KII	dokumen lengkap
15.	Rubber Boat Takalar	9 KII	9 KII tidak dilengkapi dokumen sehingga diberikan pembinaan
16.	Rubber Boat Wakatobi	-	tidak operasi

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.894.693.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp426.079.186 atau 22,49%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,64% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK11 JUMLAH HARI OPERASI KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung di Triwulan II tahun 2020 adalah 35 hari operasi dengan persentase capaian kinerja 120%. Rincian capaian kinerja IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2020

No	Nama Kapal Pengawas	Total Hari Operasi
1.	KP. Hiu 02	34
2.	KP. Hiu 05	35

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp9.027.447.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp3.046.693.716 atau 33,75%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,52% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK12 JUMLAH HARI OPERASI SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian jumlah hari operasi speedboat/rigid inflatable boat/rubber boat di Triwulan II tahun 2020 adalah 7 hari operasi dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian IKU ini merupakan rata-rata capaian operasi speedboat/rigid inflatable boat/rubber boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Hari Operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Total Hari Operasi
1.	Albacore 01	13
2.	Dolphin 03	-
3.	Dolphin 19	6
4.	Dolphin 26	5
5.	Napoleon 30	-
6.	Napoleon 31	20
7.	Napoleon 56	-
8.	Sea Rider 06	17
9.	Rubber Boat Bone	10
10.	Rubber Boat Kendari	10
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	10
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	2
13.	Rubber Boat Pangkep	-
14.	Rubber Boat Selayar	8
15.	Rubber Boat Takalar	5
16.	Rubber Boat Wakatobi	6
Rata-rata Hari Operasi		7

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.894.693.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp426.079.186 atau 22,49%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,44% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK13 JUMLAH AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN RUTIN TAHUNAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pengukuran di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

Sasaran Strategis (SS7):

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian SS7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan di dukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase Penyelesaian

Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 3) IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-7 adalah Rp488.490.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp244.431.000 atau 50,04%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-7 sebesar 99,44% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS-7 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-7 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK14 PERSENTASE PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN, PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERSANGKA SERTA SAKSI TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, jumlah kasus TPKP yang ditangani oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sebanyak 17 kasus, 12 kasus diantaranya telah P-21 dengan persentase penyelesaian TPKP 70,59%. Capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II tahun 2020 dari 100% tercapai 70,59% dengan persentase capaian kinerja hanya 70,59%.

Tabel 14. Data Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Ditangani Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	Nama Kapal	Ukuran	Bendara Kapal	Jenis Pelanggaran
1.	FBCA. Sallin 02	12.18 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
2.	FB. Berlian Jaya-A-02	39.57 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
3.	FB. Makmur 13	43.22 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
4.	Tanpa nama	1 GT	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
5.	Sheng Teng Chun No. 66	29.26 GT	Taiwan	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
6.	FBca. Quadro Ocho 8888	29 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen

7.	Tanpa nama	-	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
8.	Tanpa nama	-	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
9.	Tanpa nama	-	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
10.	Sheng Teng Chun No. 66	29.26 GT	Taiwan	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
11.	FBca. Canter Jhon	3.5 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
12.	Tanpa nama	1 GT	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
13.	Tanpa nama	1 GT	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
14.	Tanpa nama	1 GT	Indonesia	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
15.	FB. Louie – 17	67.27 GT	Philipina	Melakukan kegiatan mengangkut ikan tanpa izin dan menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan asing
16.	Fbca. Benten	1 GT	Philipina	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen
17.	FB. Louie – 17	67.27 GT	Philipina	Melakukan kegiatan mengangkut ikan tanpa izin dan menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan asing


Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp321.650.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp153.102.000 atau 47,60%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,44% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.






IK15 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARBUK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2020, dilakukan penanganan terhadap 17 kasus TPKP dan 12 kasus diantaranya telah lengkap (P-21) dengan persentase penyelesaian 70,59%. Capaian kinerja IKU ini di Triwulan II tahun 2020 adalah 70,59%.

Jumlah barang bukti yang ditangani oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung, sebanyak 11 Unit kapal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Data Barang Bukti Kapal Pelaku TPKP Triwulan II Tahun 2020

No	Nama Kapal	Ukuran	Lokasi Barbuk	Foto Kapal
1.	FBCA. Sallin 02	12.18 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
2.	FB. Berlian Jaya-A-02	39.57 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
3.	FB. Makmur 13	43.22 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
4.	Tanpa nama	1 GT		
5.	Sheng Teng Chun No. 66	29.26 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
6.	FBca. Quadro Ocho 8888	29 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	

7.	Tanpa nama	-	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
8.	FBca. Canter Jhon	3.5 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
9.	Tanpa nama	1 GT		
10.	FB. Louie – 17	67.27 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	
11.	Fbca. Benten	1 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung	

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp61.840.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp27.000.000 atau 43,66%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,52% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK16 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan bulan Juni tahun 2020, jumlah awak kapal pelaku TPKP yang ditangani oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sebanyak 77 orang yang terdiri dari: 71

orang warga negara Philipina, 5 orang warga negara Indonesia, dan 1 orang warga negara Taiwan. Jumlah awak kapal yang selesai ditangani (dimulai dari penyerahan dari penangkap sampai dengan, untuk tersangka penyerahan tahap II, untuk non justisia dipulangkan ke daerah asal/diserahkan imigrasi) sebanyak 53 orang, dengan capaian kinerja hanya 68,83% dari target Triwulan II tahun 2020 sebesar 100%.

Tabel 16. Jumlah Awak Kapal yang Selesai Ditangani per Juni 2020

No	Keterangan	WNA	WNI
1.	Dipulangkan ke daerah/negara asal	48 Orang	1 Orang
2.	Penyerahan Tahap II	3 Orang	1 Orang
TOTAL		51 Orang	2 Orang

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp105.000.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp64.329.000 atau 61,27%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,33% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS8):

Tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian SS8. Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yaitu: 1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 4) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 5) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 6) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja); 8) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 9) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 10) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan; 11) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan

PSDKP Bitung; dan 12) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS-8 adalah Rp20.118.422.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp7.861.513.777 atau 39,08%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS-8 sebesar 99,35% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS-8 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-8 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Capaian kinerja SS-8 pada Triwulan II tahun 2020, adalah sebagai berikut:

IK17 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini Rp133.900.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp7.124.100 atau 5,32%.

IK18 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 dari target 70% tercapai 68,89% dengan persentase capaian kinerja 98,41%.

Capain kinerja Triwulan II tahun 2020 sebesar 68,89% diperoleh dari akumulasi capaian 3 komponen yaitu: pemenuhan dokumen, keikutsertaan, dan keaktifan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Penerapan MP Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2020

No	Komponen	Nilai	Bobot	%	Keterangan
1.	Pemenuhan dokumen	100	20	20	dokumen PK dan LKj TW I dan II
2.	Keikutsertaan	88,89	40	35,56	target keikutsertaan 10 orang, realisasi 8 orang
3.	Keaktifan	33,33	40	13,33	4 pejabat yang terdaftar, aktif hanya 2 orang

IK19 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN RB LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Persentase capaian kinerja IKU Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100% (Hijau).

IK20 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Jumlah dokumen yang akan dihasilkan output layanan dukungan manajemen satker tahun 2020 sebanyak 30 dokume, yang terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran 9 dokumen, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 14 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN 2 dokumen, pengelolaan kepegawaian 1 dokumen, pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan 4 dokumen. Jumlah dokumen manajerial yang dihasilkan di Triwulan II tahun 2020 terdiri dari 1 dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Bitung 2020-2024 dan 3 laporan bulanan, realisasi kinerja sebesar 13% dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp411.691.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp37.928.300 atau 9,21%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efesiensi anggaran sebesar 99,77% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK21 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2020 adalah 100%. Kegiatan yang diselesaikan pada Triwulan II tahun 2020 adalah pengadaan kendaraan bermotor roda 4.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp579.300.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp471.000.300 atau 81,31%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efesiensi anggaran sebesar 99,19% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada

kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK22 PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN PERKANTORAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di Triwulan II tahun 2020 adalah 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan operasional dan pemeliharaan kantor.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp18.395.466.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp7.297.705.477 atau 39,67%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,21% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK23 UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK

Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp32.236.000, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU ini. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, belum ada realisasi anggaran.

IK24 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN SPIP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Persentase pemenuhan dokumen SPIP UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 100 %.

Alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp9.300.000, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU ini. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, belum ada realisasi anggaran.

IK25 PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN AKIP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Persentase pemenuhan dokumen AKIP UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II tahun 2020 adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp290.500.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp32.358.600 atau 11,14%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,89% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK26 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL

Capaian IKU akan diukur pada Triwulan IV tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp43.980.000, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU ini. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, belum ada realisasi anggaran.

IK27 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai IKPA UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 adalah 85% dari target 65% dengan persentase capaian kinerja 120%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp63.600.000, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp14.697.300 atau 23,11%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,76% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK28 BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK PANGKALAN PSDKP BITUNG DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN PANGKALAN PSDKP BITUNG TA. 2019

Capaian IKU ini akan diukur pada Triwulan II tahun 2020.

Alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp100.000.000, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian IKU ini. Sampai dengan Triwulan II tahun 2020, baru terealisasi sebesar Rp700.000 atau 0,70%.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 adalah Rp39.322.745.000. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2020 UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Rp12.265.112.385 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 31,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemantauan dan Operasi Armada (2350)	17.484.904.000	4.022.818.508	23,01
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351)	488.490.000	244.431.000	50,04
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352)	585.840.000	45.880.200	7,83
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353)	745.089.000	91.168.900	12,24
5	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355)	20.018.422.000	7.860.813.777	39,27
Jumlah		54.435.595.000	12.265.112.385	31,19

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Strategis (SS) dan 28 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2020 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 102,59. Dari 28 indikator kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, 19 indikator kinerja capaiannya masuk kategori “Baik” atau dengan persentase capaian 90% s.d 100% (Hijau), 3 indikator kinerja capaiannya masuk kategori “Cukup” atau dengan persentase capaian 70% s.d <90%, dan 6 Indikator Kinerja “Belum ada penilaian”.

Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Triwulan I dengan persentase kenaikan sebesar 2,98%. Kenaikan persentase capaian pada Triwulan II tahun 2020, disebabkan persentase capaian beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan atau diatas 100%, yaitu: Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP, Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dan Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Beberapa IKU perlu dilakukan percepatan pencapaian kinerja, yaitu: IK8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; IK16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan

IK18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

4.2. Rekomendasi

Saran

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2020, khususnya pada IKU8 Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung perlu dilakukan perbaikan terhadap unit yang mengalami kerusakan, sehingga dapat segera dioperasikan untuk mendukung pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Demikian juga untuk IKU18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, harus didorong agar setiap pejabat aktif dalam upload kegiatan dan informasi ke dalam Bitrix KKP.

Rencana Tindaklanjut

Segera melakukan perbaikan terhadap speedboat yang mengalami kerusakan, sehingga dapat segera dioperasikan untuk mendukung pengawasan SDKP, serta menyusun langkah-langkah percepatan pencapaian kinerjanya kedepan serta memberikan sosialisasi kepada para pejabat tentang pentingnya ikut aktif dalam mengupload informasi ke dalam Bitrix KKP.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung
Triwulan II Tahun 2020